PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL LENGKAP TFCA-SUMATERA

Administrator Program TFCA-Sumatera
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia

2015

I. PANDUAN UMUM

A. Alur Proses Permohonan Hibah

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) sebagai Administrator Program TFCA-Sumatera di Indonesia mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada Bagian I section F.1 untuk menyampaikan Proposal yang secara ringkas memperlihatkan pendekatan inovatif dalam upaya konservasi hutan Sumatera. Pemohon perlu menyampaikan Proposal sebagaimana instruksi di bawah ini. Proposal tersebut harus memperlihatkan uraian secara ringkas pendekatan yang akan dilakukan dan gambaran hasil yang akan dicapai, dan mengapa Program TFCA-Sumatera perlu mendanai kegiatan tersebut.

Proposal yang disampaikan akan dinilai oleh Tim Penilai berdasar kriteria sebagaimana tercantum dalam undangan ini. Proposal yang memenuhi kriteria kelulusan penilaian, akan diminta untuk melakukan dan menyampaikan perbaikan dalam bentuk Proposal Lengkap. Perlu disampaikan disini juga bahwa tidak ada jamiman bahwa Proposal yang diajukan nanti pasti diterima dan disetujui TFCA-Sumatera. Proposal hanya dapat disetujui jika memenuhi kriteria dan kualitas yang ditetapkan. Persetujuan terhadap pendanaan terhadap Proposal yang diajukan akan dilakukan dalam Rapat Oversight Committee TFCA-Sumatera, dan keputusan yang diambil terhadap proposal bersifat mutlak dan mengikat.

Berkas elektronik (*Soft copy*) dari Contoh Format (*template*) Proposal dapat diperoleh di Administrator atau diunduh dari situs jaringan Program TFCA-Sumatera. Proposal diserahkan kepada Administrator melalui alamat surat elektronik (*email*) berikut:

tfcasumatera@tfcasumatera.org

B. Format Proposal

Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas berukuran A4 dengan spasi tunggal, huruf (*font*) Times New Roman ukuran 12 point, atau jenis dan ukuran huruf yang setara, dengan tepi (*margin*) tidak lebih dari 1 inchi atau 2,5 cm di setiap sisinya, dan setiap lembar diberi nomor halaman. Proposal teknis yang disampaikan **maksimum 15 (lima belas) halaman**, tidak termasuk bagia muka dan lampiran (Lihat Lampiran 1). Pengusul agar menyampaikan Proposal dalam bentuk naskah elektronik (soft copy) dengan format dan template yang telah disediakan oleh Administrator Program TFCA-Sumatera. Pengusul tidak perlu menyampaikan hard copy kepada Administrator. Format penulisan Proposal dapat dilihat pada Lampiran 1.

C. Kriteria Penilaian

Penilaian proposal akan menggunakan 5 kriteria, yaitu 1) pendekatan teknis, 2) hasil yang diharapkan, 3) kapasitas teknis dan administrasi, 4) struktur dan komposisi anggaran, dan 5) rekam jejak (Tabel 1). Secara singkat yang dimaksudkan dengan kriteria dalam Tabel 1 tersebut adalah:

1. **Pendekatan teknis**: dapat ditunjukkan dengan jelas di dalam kerangka kerja logis dan narasi mengenai penanganan ancaman dan prioritas-prioritas konservasi hutan. Kegiatan harus mengutamakan pada kegiatan di tingkat bentang alam dengan dampak konservasi positif dan nyata serta berdampak jangka panjang terhadap ekosistem/bentang alam. Kegiatan harus dibedakan antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung.

2. **Hasil yang diharapkan**: Hasil yang diharapkan adalah hasil yang dapat diukur di tingkat bentang alam, bukan dalam bentuk hasil kegiatan pendukung seperti pertemuan, jaringan, informasi yang

disebarluaskan atau pembangunan kapasitas. Hasil yang diharapkan harus secara jelas memperlihatkan hubungan dengan tujuan utama, tujuan khusus serta bagaimana mencapai hasil dan memantau kinerjanya. Akan sangat membantu apabila pengusul dapat memperlihatkan berapa luas hutan (pada bentang alam target) yang terselamatkan melalui kegiatan yang diusulkan. Tunjukkan kegiatan-kegiatan mana yang akan mendorong tercapainya hasil yang diharapkan.

Tabel 1. Kriteria penilaian proposal

No.	Kriteria	Nilai maksimum
1	**Pendekatan Teknis** – untuk menangani ancaman dan prioritas-prioritas TFCA dalam Rencana Strategis. Mempunyai tujuan umum dan khusus yang jelas yang dicapai melalui kegiatan yang efektif sehingga secara keseluruhan akan mencapai dampak konservasi yang diidentifikasikan. Pendekatan teknis utamanya dinilai melalui kerangka kerja logis, rencana kerja dan metoda pelaksanaan.	40
2	**Hasil yang diharapkan**: hasil terukur, indikator dan rencana pemantauan dan evaluasi, hasil jangka pendek dan panjang. Secara jelas memperlihatkan hubungan dengan tujuan dan kegiatan. Memperlihatkan jelas tentang potensi keberlanjutan kegiatan.	20
3	**Kapasitas Teknis dan Administrasi** Penerima Hibah, termasuk personel kunci	15
4	**Struktur dan komposisi anggaran** yang diminta, penyertaan dana pendamping dan atau *matching program,* dan efektivitas anggaran	15
5	**Rekam jejak** (*Track Record*): catatan pengalaman, sejarah, dan capaian pengusul dalam melaksanakan program / kegiatan serupa.	10

3. **Kemampuan teknis dan administratif**: Kemampuan lembaga pengusul dalam mengelola dan mengadministrasikan segala hal terkait hibah dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kemampauan teknis dan administrative dapat juga dilihat dari rekam jejak lembaga pengusul, staf yang ada dan jaringan kerja.
4. **Efektivitas anggaran**: kemampuan penerima hibah untuk memberikan sumbangan dalam pencapaian tujuan strategis dengan anggaran yang optimum untuk mencapai hasil yang signifikan. Selain itu juga kemampuan Lembaga untuk memberikan sumbangan secara finansial atau *in-kind* dalam kegiatan ini. Semakin besar anggaran yang diajukan diharapkan akan semakin besar hasil terukur di tingkat bentang alam yang diharapkan dapat dicapai. Penerima hibah yang menyumbangkan anggaran pendamping dalam jumlah yang semakin besar akan semakin tinggi penilaiannya.Meski demikian, anggaran yang diajukan haruslah menunjukkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
5. **Rekam jejak** : kegiatan sejenis yang pernah dilakukan, dengan siapa bekerja, jumlah dana yang dikelola, hasil dan keberlanjutannya serta perkembangan dan sejarah Lembaga .

II. KETENTUAN UMUM

1. Proposal diharapkan dapat menjelaskan metoda dan pendekatan dalam pelaksanaan proyek, terutama agar pengusul mengedepankan pendekatan yang menggunakan inovasi-inovasi terutama pengembangan program yang dilaksanakan secara multi-stakeholders, serta sinergi dengan masyarakat, pemerintah daerah dan unsur swasta. Pendekatan yang dapat memberikan insentif bagi pemerintah daerah, masyarakat dan swasta sehingga mereka melaksanakan governans sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi hutan akan sangat membantu. Hal ini penting karena peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sangat vital dalam pelaksanaan program konservasi

hutan. Tanpa peran mereka maka pelaksanaan proyek konservasi hutan oleh LSM tidak akan efektif.
2. Dalam proposal perlu penjelasan di mana lembaga pengusul pernah bekerja, apa kegiatannya, kapan proyek tersebut dilaksananakan, apa hasil yang dicapai proyek tersebut dan siapa mitra dan donor yang mendukung proyek tersebut.
3. Proposal perlu menjelaskan keterkaitan antara usulan dalam proposal ini dengan proyek / kegiatan yang pernah dilaksakanan sebagaimana dijelaskan di atas. Apakah proposal ini merupakan kelanjutan, melengkapi, atau merupakan usulan baru?
4. Pengusul agar memperhatikan dan memastikan konsistensi alur dan kesesuaian antara Narasi, Kerangka Logis, dan Anggaran, sehingga secara keseluruhan merupakan satu rangkatan yang logis. Sehingga akan Nampak bahwa anggaran yang disusun telah sesuai dengan kegiatan yang diusulan sebagai penjabaran dari tujuan dan dampak kegiatan.
5. Agar menjelaskan kontribusi pengusul (alokasi waktu, sumber daya manusia, peralatan, dan komponen anggaran) terhadap proposal ini.
6. Agar menjelaskan kontribusi dari donor lain untuk Dana Pendamping (cost shares).
7. Agar memperhatikan rasionalitas komponen Biaya Pengelolaan (Management Cost) dan Sumber daya Manusia (Human Resources).
8. Perlu melampirkan peta lokasi yang lebih jelas, spesifik, dan rinci untuk menjelaskan lokasi dan kegiatan yang dilakukan, terutama lokasi hutan mana dan seberapa luasnya yang akan terlindungi karena adanya proyek ini (dampak konservasi).
9. Perlu menjelaskan analisis ancaman (threat analysis) terhadap kawasan dan keanekaragaman hayati di kawasan spesifik untuk menentukan intervensi / kegiatan, sehingga terlihat jelas kegiatan apa untuk mengatasi ancaman yang mana.

III. PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM PENGAJUAN PROPOSAL

Pertimbangan pemberian dana hibah didasarkan pada ketentuan bahwa proposal permohonan hibah harus memenuhi komponen (unsur) dari empat (4) kriteria utama berikut:

A. Dasar pembenaran (*Justifikasi*) dan kecocokan kegiatan (proyek)

Semua proposal pengajuan hibah harus dapat memberikan penjelasan dasar pembenaran dan kecocokan terhadap proyek yang diusulkan.

(a) Memperlihatkan pelaksanaan Rencana Strategis Program TFCA-Sumatera yang disusun oleh Oversight Committee sesuai FCA bagian 6.7.1 (r)(i).
(b) Memperlihatkan pemahaman dan secara jelas mengarah pada kegiatan untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap konservasi dan mengedepankan keberlangsungan serta dampak dari kegiatan dalam jangka panjang.
(c) Berisi hal-hal berikut secara jelas: tujuan-tujuan konservasi, luaran (output), kegiatan, jangka waktu, dan deliverables, yang konsisten dengan format standar.
(d) Memperhitungkan biaya yang konsisten dan realistis dengan kegiatan yang diusulkan.
(e) Menunjukkan bahwa dampak konservasi dari kegiatan yang didanai tersebut dapat dipantau dan dievaluasi, sesuai dengan rencana pemantauan dan evaluasi yang dikembangkan dan dilakukan oleh Oversight Committee sesuai dengan FCA bagian 6.7.1 (r)(iii).
(f) Jika dimungkinkan, meningkatkan pelaksanaan rencana pengelolaan/ konservasi yang telah ada untuk kawasan konservasi (kawasan dilindungi) dan koridor.
(g) Jika dimungkinkan, menunjukkan dukungan dari organisasi lain, termasuk masyarakat lokal, otorita pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, terhadap kegiatan yang diusulkan, serta apabila memungkinkan berkoordinasi dengan institusi di atas dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang diusulkan.
(h) Menunjukkan kesediakan dana pendukung untuk mendanai kegiatan yang diusulkan, sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 10% dari jumlah dana yang diajukan ke TFCA-Sumatera, apabila total dana yang diajukan ke TFCA-Sumatera tersebut lebih atau sama dengan Rp. 3.500.000.000

B. Ketaatan terhadap hukum (peraturan) dan kebijakan terkait

Proposal yang diajukan harus menunjukkan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

(a) Taat terhadap semua aturan hukum Republik Indonesia dan Amerika Serikat.
(b) Mendukung prioritas-prioritas dan kebijakan nasional yang terkait, seperti Indonesian Biodiversity Action Plan (IBSAP), Indonesian Action Plan for Protected Areas, dan Strategic Plan for the Wise Use of Wetland.
(c) Apabila kegiatan yang direncanakan secara langsung mempengaruhi pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung lainnya baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta, pemerintah daerah atau masyarakat lokal, harus disertai persetujuan tertulis terhadap proyek yang diusulkan dari otoritas atau pengelola kawasan tersebut, serta harus menunjukkan adanya koordinasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan dengan otorita atau pengelola kawasan tersebut.
(d) Perlindungan terhadap hak-hak Adat. Program TFCA-Sumatera memandang penting terhadap perlindungan hak-hak adat. Oleh sebab itu kegiatan yang didanai oleh Program TFCA-Sumatera harus memperhatikan keterlibatan masyarakat adat di dalam kegiatan, pemberitahuan akan adanya kegiatan di wilayah masyarakat adat atau minimal tidak membahayakan hak-hak adat yang telah ada di lokasi kegiatan yang berada di wilayah adat atau mungkin berdampak pada wilayah adat.

C. Manfaat bagi konservasi hutan tropis

Proposal pengajuan hibah harus memenuhi minimal tiga dari kriteria berikut:

(a) Berkontribusi terhadap konservasi spesies (jenis-jenis) yang terancam punah secara global (berdasar IUCN redlist) atau endemik dan bergantung pada hutan tropis untuk habitat kritisnya.
(b) Berkontribusi terhadap konservasi ekosistem hutan alam yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang terancam atau rentan.
(c) Berkontribusi terhadap konservasi keterwakilan tipe-tipe hutan di Indonesia.
(d) Berkontribusi dalam mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati hutan tropis.
(e) Berkontribusi terhadap penurunan ancaman atau peningkatkan pada konektivitas/conectivity antara kawasan-kawasan hutan tropis.
(f) Berkontribusi terhadap penetapan kawasan konservasi (kawasan lindung) baru.
(g) Secara langsung berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (kawasan lindung) lain beserta target-target konservasinya, yang telah ada dan dikelola pemerintah, swasta, pemerintah daerah, atau masyarakat lokal.

D. Enam tujuan utama (*Six authorized purposes*)

Kegiatan-**kegiatan** yang diusulkan diharapkan dapat menghasilkan dampak yang nyata sebagai berikut sebagai **6 tujuan TFCA-Sumatera (*six authorized purposes*)** :

1) Terpeliharanya ekosistem-ekosistem hutan pada tingkat bentang alam melalui berbagai intervensi seperti perlindungan, pemeliharaan, perluasan dan atau penambahan kawasan konservasi baru, restorasi dan meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, termasuk mendorong terwujudnya kondisi pemungkin seperti penggunaan lahan dan tata ruang yang berkelanjutan dan perbaikan kebijakan yang mengedepankan konservasi hutan;
2) Terpeliharanya habitat hidupan liar melalui pelaksanaan pengelolaan secara efektif kawasan-kawasan konservasi prioritas, membangun dan mengelola koridor satwa untuk menciptakan ketersinambungan habitat serta mendorong praktek-praktek pengelolaan terbaik sumberdaya alam di daerah penyangga kawasan konservasi dan kawasan-kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
3) Meningkatnya populasi spesies kunci yang terancam punah dan terkendalinya populasi spesies yang bernilai komersial melalui kegiatan-kegiatan pemulihan dan penyelamatan populasi dan habitat jenis terancam punah dan pengaturan pemanfaatan jenis-jenis komersial;
4) Terciptanya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan baik di tingkat ekosistem, spesies maupun genetik yang berdampak pada kelestarian hutan;
5) Meningkatnya taraf hidup masyarakat sekitar hutan sebagai bagian dari insentif yang pada gilirannya berpengaruh pada kelestarian hutan

6) Meningkatnya peran pemerintah daerah dan sektor swasta baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam konservasi hutan sehingga mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan daerah yang memberikan insentif bagi konservasi hutan;

E. Prioritisasi

Proposal permohonan hibah yang diusulkan harus mempertimbangkan prioritas program di tingkat bentang alam dan prioritas umum biologis untuk setiap lokasi geografis. TFCA-Sumatera menyusun prioritas-prioritas tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

E.1. Prioritas Program dan Komponen Intervensi

TFCA-Sumatera telah menetapkan prioritas program berdasarkan analisis terhadap kondisi terkini, upaya-upaya konservasi yang telah ada, dan peluang keberhasilan suatu intervensi. Dari analisis tersebut, TFCA-Sumatera menetapkan prioritas program berdasarkan Bentang Alam dan berdasarkan Isu konservasi terkini. Secara lebih tegas prioritas-prioritas tapak dan isu konservasi untuk pelaksanaan kegiatan akan dipandu di dalam Rencana Strategis yang merupakan dokumen dasar pelaksanaan Program TFCA-Sumatera.

1) **Program Terintegrasi berbasis bentang alam**

Untuk program yang disusun atas dasar Konservasi Bentang Alam akan diarahkan sebagai program terpadu yang mengombinasikan berbagai kegiatan dari 3 Komponen Intervensi, yaitu:

a) Kegiatan di tingkat kelembagaan dan kebijakan yang mendukung konservasi hutan dan keanekaragaman hayati
b) Kegiatan restorasi habitat dan konservasi jenis-jenis terancam punah di tingkat bentang alam
c) Kegiatan di tingkat masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peranserta masyarakat yang berdampak pada konservasi hutan.

Ketiga komponen intervensi tersebut dijalankan secara beriringan untuk mencapai dampak konservasi terhadap hutan dan keanekaragaman hayati pada tingkat bentang alam. Pada tahapan ini, diharapkan usulan (proposal) program berbasis bentang alam tidak merupakan kegiatan tunggal seperti penelitian, disain atau peningkatan kapasitas. Prioritas bentang alam dan isu konservasi pada setiap putaran Siklus Hibah akan ditetapkan secara khusus oleh TFCA-Sumatera.

Gambar 1. Skema Intervensi Kegiatan Mitra di Tingkat Bentang Alam

2). Program Konservasi Tematik

Selain program yang diarahkan untuk dilaksanakan secara terpadu berbasis bentang alam, TFCA-Sumatera membuka kesempatan pengajuan proposal kegiatan konservasi tematik berbasiskan isu konservasi terkini. Program yang diusulkan dapat merupakan kegiatan tunggal, dilaksanakan pada skala tapak (site) atau lokasi tertentu.

E.2. Prioritas Bentang Alam

Sebagai panduan, TFCA-Sumatera menentukan 13 bentang alam prioritas sebagai jangkar dalam pelaksanaan program (Gambar 2). Bentang alam prioritas dipilih berdasarkan kriteria prioritas biologis. Bentang alam prioritas TFCA-Sumatera meliputi:

1) Seulawah – Ulumasen
2) Ekosistem Leuser (termasuk TN Gunung Leuser)
3) Daerah Tangkapan air Toba Barat
4) Kawasan Hutan Batang Toru dan TN Batang Gadis
5) Dataran Angkola
6) Senepis – Semenanjung Kampar – Kerumutan
7) TN Tesso Nilo
8) TN Bukit Tiga Puluh
9) TN Kerinci Seblat
10) Ekosistem TN Berbak – TN Sembilang
11) TN Way Kambas
12) TN Bukit Barisan Selatan
13) TN Siberut dan Kepulauan Mentawai

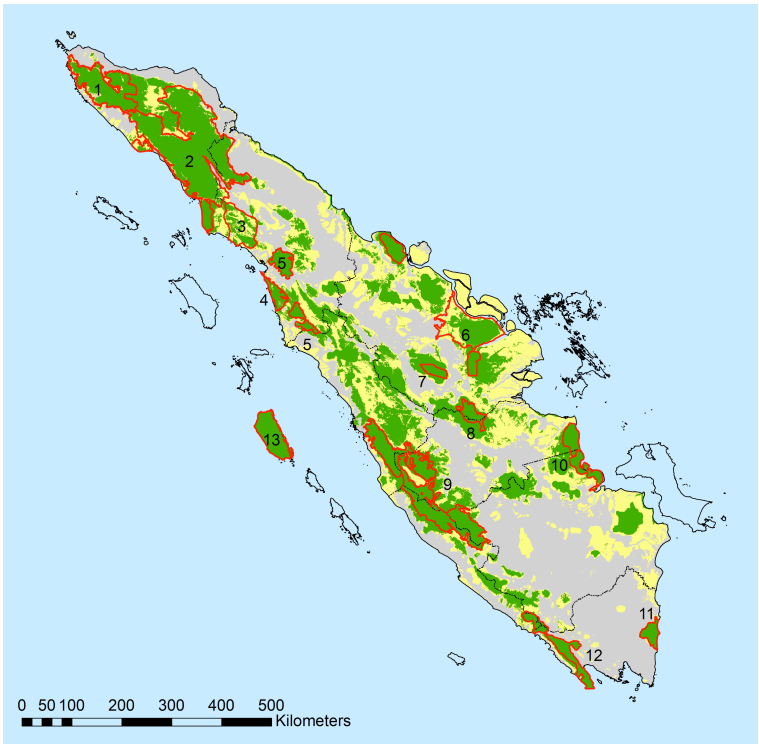

Gambar 2. Peta bentang alam prioritas TFCA-Sumatera (polygon merah). Nomor pada peta mewakili nama bentang alam prioritas.

Prioritas bentang alam ditentukan berdasarkan Kriteria Prioritas Biologis masing-masing bentang alam.

a) Keterwakilan (*representativeness*):
Tapak-tapak di dalam lokasi geografis (*Tropical Forest Areas Sites*) yang menjamin adanya keterwakilan seluruh spektrum ekoregion hutan tropis, terutama ekosistem-ekosistem hutan tropis yang sangat penting dan unit-unit *phyto-geografis* di dalam sistem jaringan kawasan konservasi dan kawasan dilindungi lainnya.

b) Tak tergantikan (*irreplaceability*):
Tapak-tapak di dalam lokasi geografis (*Tropical Forest Areas Sites*) yang mewakili satu populasi yang paling penting dari spesies target dan atau ekoregion hutan tropis atau ekosistem hutan tropis alam yang menyimpan keanekaragaman hayati tinggi, yang berada pada kondisi terancam punah secara global atau endemic.

c) Mendesak (*urgency*):
Tapak-tapak di dalam lokasi geografis (*Tropical Forest Areas Sites*) yang memerlukan tindakan konservasi segera dan atau mengalami ancaman yang sangat tinggi terhadap ekoregion hutan tropis, ekosistem alam hutan tropis, dan spesies-spesies yang secara global terancam dan atau endemik.

d) Komplementaritas (*complementarity*)
Tapak-tapak di dalam lokasi geografis (*Tropical Forest Areas Sites*) yang spesies, ekoregion, ekosistem hutan tropis alamnya berbeda dengan kawasan yang dikelola di dalam sistem kawasan konservasi yang telah ada.

e) Fungsional (*functionality*):
Tapak-tapak di dalam lokasi geografis (*Tropical Forest Areas Sites*) yang secara ekologis mendukung (*viable*) atau mempunyai luasan cukup dan kompak untuk dapat bertahan dalam periode yang lama.

IV. PERSYARATAN DAN KETENTUAN BAGI LEMBAGA PENGUSUL

A. Ketentuan Bagi Lembaga Pengusul

A.1. Kelembagaan

A.1.1. Lembaga yang berhak mengajukan permohonan hibah (eligible entity)

Lembaga yang dapat menerima hibah dari Program TFCA-Sumatera adalah:

i. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan, kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati.
ii. Masyarakat lokal dan organisasi berbasis masyarakat yang didirikan dan beroperasi di Indonesia.
iii. Lembaga lokal dari lembaga internasional atau regional lainnya yang memenuhi syarat, atau aktif di Indonesia, yang bukan merupakan Lembaga yang Tidak Diperbolehkan (non-eligible entity). Lembaga internasional dapat mengajukan permohonan dana hibah sebagai bagian dari konsorsium dengan lembaga lokal dan tidak berperan sebagai koordinator konsorsium atau penerima hibah dari TFCA-Sumatera.
iv. Universitas, termasuk perguruan tinggi negeri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, dapat menerima dana hibah Program TFCA-Sumatera.

A.1.2. Lembaga yang tidak diperkenankan mengajukan permohonan hibah (non-eligible entity)

Lembaga yang tidak dapat menerima hibah dari Program TFCA-Sumatera (*non-eligible entity*) adalah orang atau lembaga yang termasuk dalam kriteria berikut atau yang berafiliasi padanya:

i. Administrator Program TFCA-Sumatera (Yayasan KEHATI).
ii. Depositori, yaitu perusahaan yang mengelola dan menyimpan dana Program TFCA-Sumatera (HSBC).
iii. Institusi pemerintah, lembaga pemerintah, dinas-dinas pemerintah, pemerintah daerah, kelurahan, departemen atau institusi sejenis kecuali perguruan tinggi negeri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia.

iv. Lembaga dari anggota Tetap OC, USAID, Kementerian Kehutanan, Yayasan KEHATI, dan Conservation International.
v. Lembaga dari Anggota Tidak Tetap OC (berlaku selama lembaga tersebut menjadi Anggota Tidak Tetap OC). Saat ini lembaga yang merupakan Anggota Tidak Tetap OC adalah Transparency International Indonesia, Indonesia Business Link, dan Universitas Syiah Kuala.
vi. Siapapun yang (i) namanya tercantum pada Daftar Orang Terlarang (Prohibited Person List), atau (ii) termasuk didalamnya dimiliki oleh, dikendalikan oleh, bertindak untuk dan atas nama, menyediakan bantuan, dukungan, sponsor atau layanan dalam bentuk apapun pada, atau dengan cara lain berhubungan dengan orang yang dimaksud atau dijabarkan dalam Daftar Orang Terlarang. Termasuk dalam Daftar Orang Terlarang adalah daftar yang dikeluarkan oleh PBB atau lembaga keamanan negara Indonesia atau the OFAC (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury) List.
vii. Lembaga lainnya yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh *Oversight Committee*.

Selain Lembaga yang tidak diperbolehkan (*non-eligible entity*) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 1.1 FCA, Lembaga yang tidak dapat menerima hibah dari Program TFCA-Sumatera termasuk juga:

i. Perusahaan pribadi dan umum, termasuk Koperasi dan Asosiasi yang didanai pemerintah.
ii. Asosiasi perusahaan/industri dan buruh.
iii. Militer, organisasi para militer atau polisi.
iv. Organisasi politik (termasuk partai politik) atau organisasi masyarakat yang berafiliasi pada atau dibentuk oleh partai politik.
v. Individu/perorangan.

Lembaga, konsorsium dan koordinator konsorsium yang sedang mendapatkan pendanaan hibah dari TFCA-Sumatera tidak diperkenankan untuk mengajukan Proposal pada Siklus Hibah berikutnya.

A.2. Kapasitas Teknis dan Administratif

Pemohon hibah harus memperlihatkan kapasitas memadai dalam bidang administrasi dan teknis serta berpengalaman dalam menjalankan usulan yang sesuai dengan Rencana Strategis TFCA-Sumatera.

A.3. Ketaatan terhadap Hukum dan Kebijakan Terkait

Proposal yang diajukan harus mampu menunjukkan ketaatannya terhadap hokum dan kebijakan yang terkait. Ketentuan ini termasuk:

a) Taat terhadap semua aturan hukum Republik Indonesia dan Amerika Serikat.
b) Mendukung prioritas-prioritas dan kebijakan nasional yang terkait, seperti Indonesian Biodiversity Action Plan (IBSAP), Indonesian Action Plan for Protected Areas, dan Strategic Plan for the Wise Use of Wetland.
c) Apabila kegiatan yang direncanakan secara langsung mempengaruhi pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung lainnya baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta, pemerintah daerah atau masyarakat lokal, harus disertai persetujuan tertulis terhadap proyek yang diusulkan dari otoritas atau pengelola kawasan tersebut, serta harus menunjukkan adanya koordinasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan dengan otorita atau pengelola kawasan tersebut.
d) Perlindungan terhadap hak-hak Adat. Program TFCA-Sumatera memandang penting terhadap perlindungan hak-hak adat. Oleh sebab itu kegiatan yang didanai oleh Program TFCA-Sumatera harus memperhatikan keterlibatan masyarakat adat di dalam kegiatan, pemberitahuan akan adanya kegiatan di wilayah masyarakat adat atau minimal tidak membahayakan hak-hak adat yang telah ada di lokasi kegiatan yang berada di wilayah adat atau mungkin berdampak pada wilayah adat.

Proposal pengajuan hibah harus dapat menunjukkan relevanasi dengan Program TFCA-Sumatera:

a) Memperlihatkan kaitan dan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian Rencana Strategis Program TFCA-Sumatera yang disusun oleh Oversight Committee sesuai FCA bagian 6.7.1 (r)(i).
b) Memperlihatkan pemahaman dan secara jelas mengarah pada kegiatan untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap konservasi dan mengedepankan keberlangsungan serta dampak konservasi (conservation impact) dalam jangka panjang dari kegiatan-kegaitan yang dilaksanakan.
c) Berisi hal-hal berikut secara jelas: tujuan konservasi utama (goal), tujuan-tujuan konservasi (objectives), luaran (output), kegiatan, jangka waktu, dan deliverables (terukur), yang konsisten dengan format standar.
d) Memperhitungkan biaya (budget) yang konsisten dan realistis dengan kegiatan yang diusulkan.
e) Menunjukkan bahwa dampak konservasi dari kegiatan yang didanai tersebut dapat dipantau dan dievaluasi, sesuai dengan rencana pemantauan dan evaluasi yang dikembangkan dan dilakukan oleh Oversight Committee sesuai dengan FCA bagian 6.7.1 (r)(iii).
f) Mampu meningkatkan pelaksanaan rencana pengelolaan/ konservasi yang telah ada untuk kawasan konservasi (kawasan dilindungi) dan koridor.
g) Mampu menunjukkan dukungan dari organisasi lain, termasuk masyarakat lokal, otorita pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, terhadap kegiatan yang diusulkan, serta apabila memungkinkan berkoordinasi dengan institusi di atas dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang diusulkan.

A.4. Rekam Jejak

Pemohon diharuskan menyampaikan sejarah dan pengalaman lembaga dalam kaitannya dengan lokasi dan bentuk kegiatan yang sudah dilakukan setidaknya tiga tahun terakhir, hasil dan dampak yang dicapai dalam, bidang konservasi, serta jumlah dana yang pernah dikelola baik dari donor, pemerintah atau dana swadaya dari hasil usaha sendiri.

B. Dukungan Pemda, Swasta dan Masyarakat Setempat

Mengingat peran pemerintah dan masyarakat serta sektor swasta sangat signifikan dalam kegiatan konservasi di tingkat bentang alam, maupun kegiatan pendukungnya, maka permohonan **diharuskan** mendapatkan dukungan dari, atau akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat lokal serta swasta untuk menjamin kelancaran impelementasi program dan kegiatan yang akan diusulkan. Dukungan tersebut idealnya dalam bentuk kerja sama di lapangan atau berupa integrasi kegiatan-kegiatan yang bersifat komplementer, baik dalam bentuk kesepakatan formal seperti surat dukungan, rekomendasi atau salinan perjanjian kerja sama.

Secara khusus isi proposal disarankan mengacu pada hal-hal berikut:

1. Masukkan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja pengusul dan jelaskan sejauh mana proposal ini mendukung prioritas pemerintah tersebut.
2. Identifikasikan donor dan lembaga lain yang bekerja di wilayah yang sama di mana proyek ini akan dilaksanakan. Identifikasi pula apa kegiatannya, di mana lokasi proyeknya, kapan dilaksanakannya, dan apa hasil proyek tersebut ?

V. FORMAT PENULISAN PROPOSAL

Format penulisan Proposal yang disampaikan kepada Program TFCA-Sumatera adalah sebagai berikut:

a) Halaman Sampul (*cover page*), **maksimum 1 (satu halaman**)
   1. Judul usulan kegiatan (program), wilayah geografis (bentang alam), total anggaran yang diusulkan, jangka waktu pelaksanaan (tahun)
   2. Foto Bentang alam (jika ada)
   3. Nama dan alamat lengkap Lembaga (untuk Lembaga utama dan anggota konsorsium, jika dalam bentuk konsorsium)

b) Halaman Informasi dasar Lembaga, **maksimum 1 (satu halaman**)
   Meliputi: Nama dan alamat Lembaga (untuk Lembaga utama dan anggota konsorsium, jika dalam bentuk konsorsium), Status lembaga (*legal entity*), *Contact person* (*lead contact person*, alamat, telepon, fax, email)

c) Ringkasan Kegiatan, meliputi Judul, bentang alam lokasi kegiatan, serta ringkasan usulan **(maksimum 1 halaman)**

d) Usulan Teknis, **maksimum 15 (lima belas halaman**)
   Usulan teknis merupakan inti dari proposal menguraikan secara ringkas dan jelas tentang program beserta latar belakang, kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil yang akan diusulkan. Secara umum, usulan teknis menguraikan penjelasan teknis program dengan mengacu kepada bagian IV. Kerangka Logis Proyek.

e) Lampiran lampiran
   - Riwayat Hidup Singkat (CV) dan Tugas Tiga Personalia Utama (Penanggung Jawab / Koordinator Konsorsium , Koordinator / Manajer Program, Koordinator / Manajer Keuangan & Administrasi) dalam Program ini.berupa
   - Bagan keorganisasian Lembaga / Konsorsium
   - Kerangka Kerja Logis (Logframe),
   - Rencana Kerja (Workplan)
   - Rencana Anggaran Biaya (Budget)
   - Peta lokasi kegiatan
   - Rekomendasi, surat dukungan dari pihak terkait (Bupati, Balai Taman Nasional, Balai KSDA, Dinas Kehutanan, masyarakat, dll. Khusus kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan di bawah pengelolaan UPT Kemenhut, seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, dan sejenisnya, proponen diharuskan menyampaikan surat dukungan atau rekomendasi dari UPT pengelola terkait (Balai KSDA, Balai Taman Nasional, BPDAS)

VI. KERANGKA LOGIS PROYEK

Proposal yang diajukan harus mendeskripsikan kerangka logis proyek (Logical framework) dengan baik. Kerangka logis / Logframe yang dideskripsikan harus mencakup berbagai hal dasar berikut;

a. **Dampak Konservasi (*Conservation Impact*).** Berisi Ringkasan Narasi dari dampak Konservasi (*Narrative Summary*) serta penjabaran proyek dan targetnya di semua tingkatan secara kuantitatif dan kualitatif. Narasikan secara singkat target akhir proyek dan dampak konservasi yang akan dicapai pada saat proyek berakhir.

b. **Tujuan (*Goal*)**. Pernyataan tentang sasaran dan tujuan, serta bagaimana tujuan tersebut berhubungan dengan upaya menghadapi ancaman dan tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada di wilayah geografis/bentang alam dimaksud. Sasaran dan Tujuan di tingkat ini adalah Sasaran dan Tujuan di tingkat Proyek, dimana dampak konservasi perlu disampaikan di sini.

c. Komponen Intervensi (*Interventions*). Komponen Intervensi merupakan elemen dari wilayah intervensi(lihat Gambar 1.) dimana berdasar latar belakang dan tujuan yang akan

dicapai pengusul menentukan satu atau lebih komponen dari setiap level wilayah intervensi. Agregat dari komponen-komponen proyek tersebut akan mengarah pada pencapaian sasaran proyek.

d. **Kegiatan dan Subkegiatan (*Activities and subactivities*).** Kegiatan dan sub-kegiatan merupakan aktivitas dimana intervensi akan diterjemahkan ke dalam luaran-luaran yang diukur melalui indikator yang dapat diverifikasi melalui *means of verification* atau *verifier.* Kegiatan dan atau sub kegiatan inilah yang akan dilaksanakan dan dapat dilihat di lapangan. Dalam suatu proyek atau program sangat penting menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dan harus dapat mengukur dan memprediksi bahwa dengan kegiatan yang dilakukan maka *output* dan *outcome* proyek akan tercapai. Kegiatan/sub kegiatan berisi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai "Hasil yang Diharapkan.
e. **Luaran Kegiatan dan Indikator (*Outputs and Indicators*).** Hasil yang direncanakan dan ukuran-ukuran indikatif (*indikator*) untuk evaluasi hasil. Merupakan luaran terukur dari setiap kegiatan.
f. **Alat Verifikasi (*Means of Verifications*).** Merupakan alat/sumber informasi/data yang digunakan untuk menjelaskan indikator dan sasaran kinerja.
g. **Asumsi dan analisis resiko (*Risks analysis*).** Asumsi-asumsi terpenting yang mengikuti tujuan disetiap tingkatan. Merupakan faktor-faktor eksternal (diluar kontrol pengelola proyek) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan indikator dan sasaran kinerja disemua tingkatan.

CONTOH dan Format Proposal Lengkap TFCA-Sumatera

TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION FOR SUMATERA
TFCA-SUMATERA

PROPOSAL PENDANAAN HIBAH

Judul Usulan Kegiatan

Gambar, foto, ilustrasi

Diajukan kepada Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera

Diusulkan oleh :

Lembaga pengusul

2016

Informasi Dasar ORGANISASI

1. **Nama Organisasi:**
2. **Alamat Lengkap:** (*Jalan dan Nomor, Kota, Kode Pos, Propinsi, Telepon, Faximile, e-mail)*
3. **Status Organisasi :**
   ⇒ Yayasan, Perkumpulan, Jaringan, Lembaga Swadaya Masyarakat; Masyarakat Ilmiah; Organisasi Kebudayaan; organisasi Pemuda; Kelompok Swadaya Masyarakat; Organisasi Keagamaan; Asosiasi Profesi; Organisasi Mahasiswa; Organisasi Lainnya *(sebutkan)*.
4. **Akte Notaris:** (*No. dan Nama Notaris*)
   ⇒ Copy Akte dilampirkan
5. **Tanggal Berdiri:** (*Hari, bulan, tahun*)
6. **Susunan Dewan Pengurus:** (*Nama/Jabatan*)
7. **Direktur/Ketua:**
8. **Tujuan Organisasi:**
9. **Dana yang Dikeluarkan Tahun Sebelumnya: Rp.**
10. **Sumber dan Jumlah Organisasi Lain yang Memberikan Dukungan/Dana dalam 3 (tiga) kegiatan terakhir**

No	Tahun	Pemberi Dana/Dukungan	Judul Kegiatan	Dukungan/Dana
1				
2				
3				

11. **Rujukan**
    ⇒ Kepada siapa TFCA-Sumatera dapat meminta informasi lebih lanjut mengenai lembaga Anda dari pihak di luar lembaga Anda.

Rujukan	Nama	Lembaga	Alamat	Telepon	Faximile
1					
2					
3					

12. **Rekening Bank Milik Lembaga**
    ⇒ No. Rekening; Pemegang rekening (atas nama lembaga); Nama Bank, Cabang dan alamat lengkapnya.

TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION-SUMATERA
TFCA-SUMATERA

PROPOSAL PENDANAAN HIBAH

JUDUL:

NOMOR REGISTER:
BENTANG ALAM:
DAMPAK KONSERVASI HUTAN (HA):
DIAJUKAN OLEH:

RINGKASAN

Diisi dengan ringkasan proposal yang secara singkat sekitar satu halaman yang menjelaskan latar belakang permasalahan dan mengapa proyek ini menjadi penting. Narasikan dalam bentuk ringkas kerangka logisnya, intervensi yang akan dilakukan, metoda dan pendekatan yang dipakai, output yang akan dicapai, ringkasan kegiatan untuk mencapai output dan dampak konservasi yang menggambarkan berapa luas hutan yang terlindungi dengan proyek ini.

DAFTAR ISI

halaman

Halaman Judul
Ringkasan proyek
Daftar Isi

BAGIAN 1. KONTEKS PROYEK (maksimal 3 halaman)
1.1. Latar Belakang
1.2. Relevansi usulan proyek
1.2.1. Kesesuaian dengan Tujuan, Prioritas dan kebijakan TFCA-Sumatera
1.2.2. Kesesuaian dengan Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah tentang Konservasi Hutan
1.3. Deskripsi Bentang Alam Target / lokasi proyek
1.3.1. Lokasi Geografis
1.3.2. Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan
1.4. Analisis Pemangku Pihak (Stakeholders Analysis) di lokasi atau bentang alam target
1.4.1. Issue Kelembagaan dan Organisasi
1.4.2. Analisis Pemangku kepentingan
1.5. Analisis Masalah dan Ancaman

BAGIAN 2. KERANGKA LOGIS (maksimal 10 halaman)
2.1. Dampak Konservasi
2.2. Komponen Intervensi
2.3. Tujuan Proyek (Goal)
2.4. Hasil, luaran, dan indicator proyek yang diharapkan dapat tercapai
2.4.1. Hasil (outcomes)
2.4.2. Luaran (Outputs)
2.4.3. Indikator (Indicators)
2.4.4. Alat verifikasi (Means of verifications)
2.5. Komponen Kegiatan
2.5.1 Kegiatan (Activities)
2.5.2. Sub Kegiatan (Sub Activities)
2.5.3. Metoda dan Pendekatan Pelaksanaan
2.6.1. Rencana Kerja (Workplan)
2.6.1. Lokasi
2.6.2. Tata waktu pelaksanaan kegiatan (Time line)
2.6.3. Target tahunan (Milestones)
3.4 Rencana Anggaran Biaya
3.4.1. Rincian Anggaran Indikatif (Anggaran rinci agar dilampirkan)
3.4.2. Sumber Pendanaan (TFCA-Sumatera, swadaya, donor, dan sumber lain)
3.5. Asumsi, Analisis Risiko dan Keberlanjutan
3.5.1 Asumsi dan Resiko
3.5.2 Keberlanjutan

BAGIAN 4. PELAKSANAAN PROYEK (maksimal 3 halaman)
4.1. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pelibatan Pemangku Kepentingan
4.1.1 Lembaga Pelaksana / konsorsium
4.1.2 Personel Pengelola Proyek dan Tim Lapangan
4.1.3 Steering Committee Proyek
4.1.4 Mekanisme Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Mitra Penerima Manfaat
4.2. Pelaporan, Review, Pemantauan dan Evaluasi

LAMPIRAN

A. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan Organisasi dan Ketua Pelaksana
B. Matriks Kerangka Logis (Logframe)
C. Matriks Rencana Kerja (Work Plan)
D. Rencana Anggaran
E. Peta Lokasi

Informasi KEGIATAN

BAGIAN 1: KONTEKS PROYEK

1.1. Latar Belakang

Dalam latar belakang ini menjelaskan

- Kondisi terkini bentang alam
  Deskripsikan secara singkat bagaimana kondisi terkini bentang alam atau spesies atau masyrakat, atau lokasi di mana proyek akan dilaksanakan, termasuk ancaman, upaya konservasi yang telah dilakukan hingga saat ini, serta peluang konservasinya.
- Analisis Kepentingan
  Deskripsikan tentang latar belakang perlunya proyek ini dilaksanakan, termasuk hubungannya dengan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kondisi terkini yang menyebabkan proyek ini penting.
- Dasar pembenaran (*rationale/justification)*:
  - Uraikan apa yang menjadi dasar pembenaran (*rationale/justification*) mengapa proposal ini perlu mendapat dukungan dari TFCA-Sumatera?
  - Uraikan alasan mengapa lembaga anda perlu melakukannya?
  - Uraikan Kontribusi apa yang dapat ditawarkan oleh kegiatan yang diajukan dalam konstelasi program-program serupa?
- Referensi:
  Kegiatan-kegiatan riset, studi, analisis, rekomendasi proyek lain yang sudah dilakukan yang mendasari dan menjadi justifikasi ilmiah, sehingga kegiatan ini menjadi penting dan mempunyai dasar ilmiah yang kuat.

1.2. Relevansi

1.2.1. Kesesuaian dengan Kebijakan TFCA Sumatera

- Uraikan Kesesuaian proposal dengan Enam Tujuan Utama (Six Authorized Purposes)
- Uraikan Kesesuaian dengan prioritisasi (Rencana Strategis) TFCA Sumatera Uraikan Kesesuaian proposal dengan lokasi geografis (dari 13 Prioritas Kawasan) yang diprioritaskan pada Siklus Hibah terkait
- Uraikan Kesesuaian proposal dengan Tema Program yang diprioritaskan pada Siklus Hibah Terkait.

1.2.2. <u>Kesesuaian dengan Kebijakan pemerintah Pusat dan daerah</u>

- Uraikan Kesesuaian dengan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Konservasi
- Uraikan Kesesuaian dengan Analisis Kesenjangan Ekologis Keterwakilan Ekosistem di Kawasan Konservasi
- Uraikan Kesesuaian dengan Rencana-rencana Aksi Nasional Konservasi Spesies Terancam Punah

1.3. Deskripsi Bentang Alam Target / lokasi proyek

1.3.1. Lokasi Geografis

Uraikan kodisi lokasi geografis yang dipilih meliputi meliputi kondisi geografis, tutupan bentang alam dan pola penggunaan lahan, kekayaan keanekaragaman hayati yang terdapat, serta ancaman dan kerusakan yang terjadi. Lokasi Geografis: Sertakan Peta yang jelas tentang lokasi proyek dan areal dampak yang akan terselamatkan/ terlindungi dengan adanya proyek baik langsung maupun tidak langsung.

1.3.2. Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan

Deskripsikan mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi daerah lokasi proyek yang relevan dengan rencana kegiatan yang diusulkan sehingga memperjelas permasalahan dan rasional pengembangan kegiatan proyek.

1.4. Analisis Pemangku Pihak (Stakeholders Analysis) di lokasi atau bentang alam target

1.4.1. Issue Kelembagaan dan Organisasi

Deskripsi mengenai issu-issu dan sistem kelembagaan dan organisasi pengelolaan hutan yang ada di lokasi target, termasuk peran-peran yang ada dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,

swasta, lembaga adat, masyarakat pelaku kegiatan, NGO, dll, maupun issue marginalisasi satu atau lebih kelompok masyarakat

1.4.2. Analisis Pemangku kepentingan

Analisis Pemangku kepentingan: Deskripsi mengenai pemangku kepentingan yang terlibat di lokasi target baik pemangku kepentingan yang legal maupun tidak legal yang mempengaruhi pengelolaan kawasan target sehingga memerlukan adanya penanganan

1.5. Analisis Masalah dan Ancaman

Pengertian masalah merupakan satu atau kombinasi dari hal berikut:

- Situasi yang tidak dikehendaki
- Suatu ketimpangan, ketidak-adilan
- Situasi yang akan diubah oleh suatu program

Masalah Prioritas perlu diidentifikasi karena: terdapat banyak masalah, tetapi perlu menemukan masalah prioritas/paling strategis. Kriteria masalah prioritas/strategis adalah masalah yang mempengaruhi tujuan/efektivitas baik dari segi besaran/cakupan masalah (*magnitude*) maupun dampak sosial/ kesehatan/ ekonomi. Masalah prioritas akan mempengaruhi pelaksanaan baik dari segi biaya, tenaga dan teknologi.

Narasikan permasalahan, yaitu apa yang menjadi masalah prioritas sehingga perlu dilakukan perbaikan? Lakukan analisis ancaman (*threat analysis*) sehingga dengan program yang diusulkan ancaman tersebut akan menurun atau hilang. Identifikasikan dan analisis masalah-masalah prioritas terkait dengan keadaan yang ingin diperbaiki oleh KEGIATAN. Siapa penerima manfaat (*beneficiary*)/"Kelompok Sasaran" yang akan merasakan manfaat. Identifikasi seberapa besar dampak kegiatan ini terhadap konservasi hutan, sedapat mungkin dalam satuan luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebutkan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kegiatan. Dalam analisis masalah perlu digambarkan POHON MASALAH, sebagaimana contoh di bawah ini.

Contoh Pohon Masalah

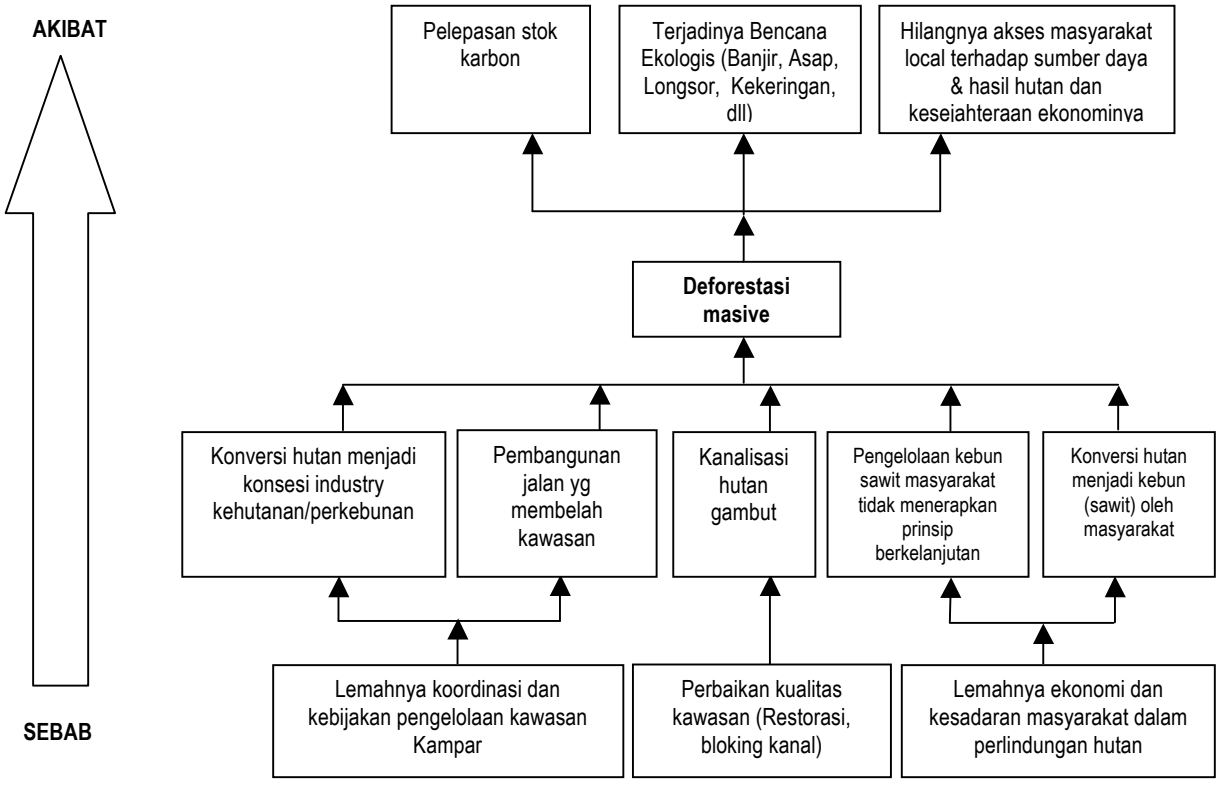

BAGIAN 2. KERANGKA LOGIS

Bagian ini menguraikan kerangka logis secara naratif dari matriks yang disampaikan dalam lampiran. Uraian disampaikan secara ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan logframe adalah ;

- Kerangka Kerja Logis (*Logframe*) merupakan ringkasan proyek yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan proyek serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja.
- Logframe berguna untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan serta untuk mengetahui secara rinci tujuan proyek, baik secara mikro maupun makro.
- Logframe dibuat secara singkat tetapi cukup rinci, sehingga dengan hanya melihat kerangka kerja logis, garis besar isi keseluruhan proyek sudah dapat diketahui.
- Logframe dibuat pada saat proyek direncanakan untuk disertakan dalam dokumen usulan proyek (proposal). Matriks logframe sebaiknya selalu diperbaiki sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perkembangan perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- Logframe dapat dipakai untuk menilai proyek pada setiap tahap, yaitu tahap perencanaan (*ex-ante = appraisal*), tahap pelaksanaan (*on-going evaluation*) dan tahap selesainya proyek (*ex-post evaluation)*.

Penyusunan Logframe mencakup :

1. menentukan **masukan**, **luaran**, **hasil**, **manfaat** dan **dampak** proyek dalam suatu indikator dan sasaran kinerja;
2. menentukan indikator atau ukuran yang dapat menunjukan tingkat pencapaian setiap tujuan secara kuantitatif;
3. hubungan kausal (*means-end*) antara indikator-indikator tersebut;
4. asumsi-asumsi yang mengikuti tujuan di setiap tingkatan, yaitu faktor-faktor luar (eksternal) yang tidak dapat dikontrol oleh proyek, tetapi dapat mempengaruhi tercapainya tujuan proyek dan hubungan antara masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Dalam proposal, uraikan logframe berdasarkan runutannya.

2.1. Dampak Konservasi (Conservation Impact)

Dampak konservasi hutan adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan ini dan merupakan informasi yang menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya proyek juga menggambarkan aspek makro proyek, tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional. Dampak Konservasi menarasikan secara singkat target akhir proyek dan dampak konservasi yang akan dicapai pada saat proyek berakhir. Sebagai contoh: “Terselamatkannya ekosistem gambut pada bentang alam Semenanjung Kampar, Senepis dan Kerumutan seluas 700 ribu hektar melalui pengembangan penata gunaan lahan secara berkesinambungan, restorasi lahan gambut dan pengembangan ekonomi rakyat”.

2.2. Komponen Intervensi

Komponen Intervensi merupakan bagian dari proyek yang dapat dibedakan berdasar 3 wilayah intervensi yaitu komponen yang terkait dengan (i) intervensi di tingkat institusi yang mendorong perbaikan kebijakan, peningkatan kapasitas, pengembangan kolaborasi, dsb.; (ii) intervensi di tingkat bentang alam yang mendorong perbaikan kapasitas bentang alam, seperti restorasi, perlindungan, efektivitas pelaksanaan pengelolaan SDA; dan (iii) intervensi di tingkat masyarakat lokal untuk mendorong perbaikan sosial ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada konservasi hutan pada bentang alam target. Untuk setiap tingkat intervensi, komponen dapat berjumlah lebih dari satu.

2.3. Tujuan (Goals)

Tujuan umum (*goals*) merupakan tujuan yang ingin dicapai dari suatu Komponen intervensi, sehingga satu komponen mempunyai satu tujuan umum. Ketercapaian tujuan umum ini dapat diukur melalui hasil (*outcome*) yang ingin dicapai oleh kegiatan-kegiatan. Tujuan –tujuan dalam logframe yang dirancang dapat merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pemecahan masalah-masalah yang teridentifikasi di analisis masalah. Tujuan-tujuan dapat digambarkan

dalam suatu pohon tujuan. Pohon tujuan merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai dari intervensi untuk mengatasi permasalahan dan digambarkan dalam suatu pohon masalah.

Contoh: Pohon Tujuan

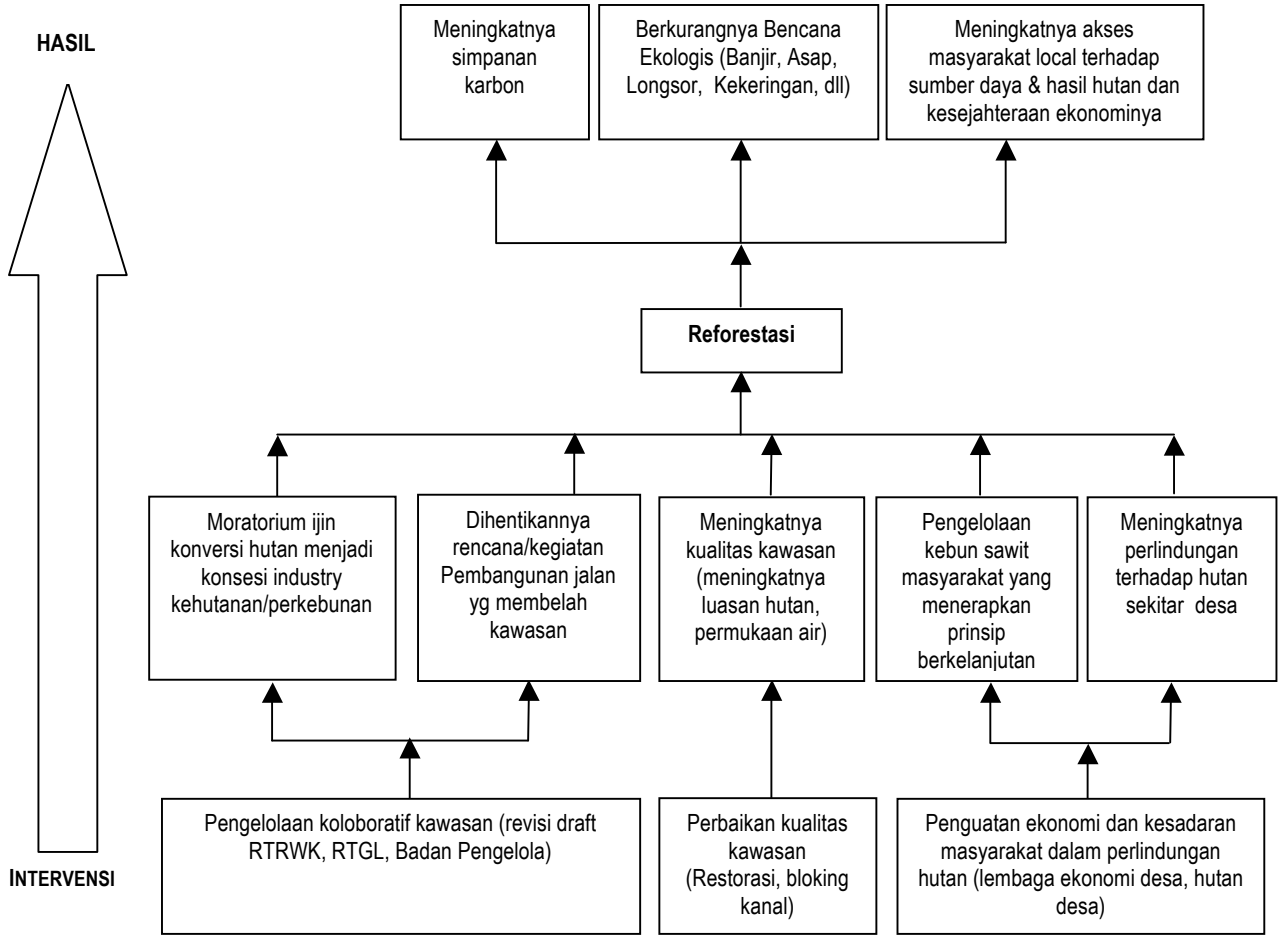

2.4. Hasil, luaran, dan indicator proyek yang diharapkan dapat tercapai

2.4.1. Hasil (outcomes)

Merupakan hasil untuk mengukur kinerja dari tujuan umum komponen yang sedapat mungkin dapat diukur (*tangible*).

2.4.2. Luaran (Outputs)

Luaran merupakan hasil terukur dari suatu kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan. Luaran harus dapat diukur dan diverifikasi, oleh sebab itu luaran biasanya bersifat kualitatif dan kuantitatif.

2.4.3. Indikator (Indicators)

Indikator merupakan hasil terukur dari suatu sub kegiatan yang merupakan rincian dari luaran.

2.4.4. Alat verifikasi (Means of verifications)

Alat Verifikasi atau alat penjelasan dan pembuktian (Means of Verification-MOV atau Verifier). Alat/sumber informasi/data yang digunakan untuk menjelaskan indikator dan sasaran kinerja

2.5. Komponen Kegiatan

Kegiatan dan sub-kegiatan merupakan aktivitas dimana intervensi akan diterjemahkan ke dalam luaran-luaran yang diukur melalui indikator yang dapat diverifikasi melalui means of verification atau verifier. Kegiatan dan atau sub kegiatan inilah yang akan dilaksanakan dan dapat dilihat di lapangan. Dalam suatu proyek atau program sangat penting menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dan harus dapat mengukur dan memprediksi bahwa dengan kegiatan yang dilakukan maka output dan outcome proyek akan tercapai. Kegiatan/sub kegiatan berisi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai "Hasil yang Diharapkan" dan perlu dijabarkan sebagai berikut:

1. Apa bentuk kegiatan secara kongkret/nyata dilapangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan
2. Apa tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai "Hasil yang Diharapkan" dari usulan kegiatan yang akan diajukan ke TFCA Sumatera ?.

2.5.1 Kegiatan (Activities)

Kegiatan merupakan uraian tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk memperoleh hasil terukur sebagaimana dijelaskaan dalam luaran (*output*).

2.5.2. Sub Kegiatan (Sub Activities)

Sub Kegiatan merupakan pemecahan atau pembagian (*breakdown*) kegiatan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil, yang secara agregat ditujukan untuk mencapai luaran (output) yang diinginkan. Sub kegiatan juga dapat merupakan runutan atau tahapan dari pelaksanaan suatu Kegitan. Hasil atau kinerja sub kegiatan diukur melalui indikator.

2.5.3. Metoda dan Pendekatan Pelaksanaan

Program TFCA-Sumatera harus dilaksanakan berdasarkan pendekatan pengelolaan terpadu sebagai instrumen untuk memperbaiki kegagalan upaya masa lampau yang umumnya terfokus pada lokasi spesifik atau permasalahan tertentu. Program TFCA-Sumatera sangat menghargai pengelolaan kolaboratif yang dikembangkan para pihak dan dilembagakan dalam bentuk konsorsium atau lembaga kolaboratif lain yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, baik LSM, Perguruan Tinggi, Pemerintah, Swasta dan Kelompok Masyarakat/KSM. Pembiayaan program TFCA-Sumatera akan disalurkan melalui LSM, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat/KSM.

Pendekatan konseptual yang harus diadopsi para pihak dalam mengusulkan proposal perlu dilakukan melalui pendekatan pengelolaan kolaboratif yang merupakan pendekatan kunci program TFCA-Sumatera dan diharapkan mampu meningkatkan sinergi para actor. Pengelolaan kolaboratif harus disusun oleh para aktor pembangunan yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya hayati dan ekosistemnya di dalam lansekap yang akan dikelola, baik penentu kebijakan (pemerintah), pengelola kawasan hutan (pemerintah maupun swasta), pelaku pembangunan di tingkat tapak, LSM, lembaga masyarakat/KSM, Perguruan Tinggi dan aktor-aktor pendukung lain yang relevan.

Pengusul perlu mengembangkan metoda atau pendekatan pelaksanaan yang dapat memberikan insentif bagi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sehingga dari proyek ini akan terjadi perubahan perilaku baik di pihak pemerintah daerah, swasta dan masyarakat ke arah konservasi hutan dan atau pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Pendekatan dengan cara ini sangat penting karena dengan pendekatan yang tradisional dimana LSM melaksanakan proyek konservasi tanpa adanya insentif bagi pemerintah daerah, swasta atau masyarakat terbukti tidak berhasil dalam jangka panjang. TFCA-Sumatera sangat mengharapkan pengusul mengembangkan inovasi-inovasi pendekatan yang dapat mendatangkan insentif tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip, antara lain: kesinambungan bentang alam (konektivitas lansekap), populasi minimal yang mampu berkembang-biak secara normal (viable

population), praktek pengelolaan yang baik (best management practices), prinsip kesetaraan/keadilan lintas generasi, prinsip kehati-hatian, dan prinsip tata kelola yang baik, para pihak diharapkan mampu menguraikan akar masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keanekaragaman hayati pada skala lansekap yang menjadi prioritas program TFCA-Sumatera, serta mengusulkan cara mengatasi masalah dengan memahami akar masalah tersebut, baik melalui pendekatan kebijakan, kelembagaan dan rencana pengelolaan kolaboratif yang disepakati.

2.6. Rencana Kerja (Workplan)

Rencana kerja merupakan alat untuk memandu pelaksanaan kegiatan. Rencana kerja minimal memuat kegiatan dan atau sub kegiatan yang akan dilaksanakan, tata waktu dan batas waktu penyelesaian untuk setiap kegiatan/sub kegiatan, siapa pelaksananya dan anggaran biaya untuk setiap kegiatan. Contoh rencana kerja dapat dilihat pada lampiran. Dalam proposal perlu disampaikan rencana kegiatan per lokasi seperti contoh di bawah ini.

2.6.1. Lokasi
2.6.2. Tata waktu pelaksanaan kegiatan (Time line)
2.6.3. Target tahunan (Milestones)

Tabel Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan.

No	Kegiatan	Propinsi / bentang alam / kawasan konservasi	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan) / Desa /	Waktu Pelaksanaan (Bulan, Tahun)
1	Kegiatan 1.1.1. Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten berbasis konservasi hutan gambut hutan gambut	Riau	Kab. Pelelawan, Kab Kampar, Kab Siak	Januari-Maret 2014
2	Kegiatan 1.2.1. Fasilitasi penyelesaian rancangan Perda/Pergub/Perbup mengenai pengelolaan multi pihak ekosistem gambut Semenanjung Kampar	Riau	Kab. Pelelawan, Kab Kampar, Kab Siak	April – Juni 2014
3	Kegiatan 1.2.2. Sosialisasi Perda/Pergub/Perbup	Riau	Kab. Pelelawan, Kab Kampar, Kab Siak	Juli – Oktober 2014
4	Kegiatan 1.3.1. Fasilitasi penyelesaian *blue print* Pengelolaan Multi Pihak Ekosistem Gambut Semenanjung Kampar	Riau	Kab. Pelelawan, Kab Kampar, Kab Siak	Oktober – Desember 2014
5	Dst	Dst	Dst	Dst

2.7. Rencana Anggaran Biaya

Anggaran merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek. Anggaran merupakan unsur input utama karena input-input lain seperti tenaga kerja, alat, bahan, dll dapat diterjemahkan ke dalam bentuk anggaran. Anggaran agar dirinci sampai ke tingkat detil dimana perlu disampaikan biaya per unitnya (*budget assumption*).

2.7.1. Rincian Anggaran Indikatif

Peengusul perlu menjelaskan secara singkat (indikatif) besaran dana yang diusulkan untuk pelaksanaan tiap Komponen Proyek hingga tingkat sub kegiatan. Contoh Rencana Anggaran per komponen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Contoh Anggaran Indikatif (dalam Rupiah**)**

Komponen Kegiatan	Total Anggaran	TFCA-Sumatera	Donor Lain	Swadaya
Biaya program				
1. Komponen Intervensi 1.1. Kegiatan 1.2. Kegiatan				
2. Komponen Intervensi 2.1. Kegiatan 2.2. Kegiatan 2.3. Kegiatan				
3. Komponen Intervensi 3.1. Kegiatan 3.2. Kegiatan 3.3. Kegiatan				
4. Staf Program 4.1. Honor 4.2. Asuransi				
5. Perlengkapan Program 5.1. 5.2. 5.3. dst				
Biaya Manajemen				
4.1. Honor Staf Manajemen 4.2. Overhead Cost 4.3. Perlengkapan kantor 4.4. Audit				
Total				

Note :

⇒ Rincian anggaran disajikan dalam lampiran D

2.7.2. Sumber Pendanaan (TFCA-Sumatera, swadaya, donor, dan sumber lain)

Selain sumber pendanaan yang dimohonkan dari TFCA cantumkan juga sumber pendanaan lain, termasuk swadaya yang berasal dari dalam organisasi (konsorsium), anggaran pemerintah, donor lain, yang dapat diperhitungkan sebagai kontribusi pendanaan (*cost share*) dari pengusul.

2.8. Asumsi, Analisis Risiko dan Keberlanjutan

2.8.1. Asumsi dan Resiko

Pengusul agar mengindikasikan asumsi dan resiko apa yang digunakan dalam merencanakan kegiatan proyek. Asumsi dan Resiko merupakan situasi faktor-faktor eksternal (diluar kontrol pengelola proyek) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan indikator dan sasaran kinerja disemua tingkatan. Asumsi merupakan factor eksternal pendukung kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Resiko merupakan prediksi yang dapat diperhitungkan dan diantisipasi menyebabkan gagalnya suatu kegiatanm, sehingga pengusul perlu mempersiapkan tindakan antisipatif.

2.8.2 Keberlanjutan

Setelah proyek berakhir, maka tidak boleh terjadi bahwa berakhir pulalah seluruh kegiatan yang ada di lokasi proyek. Untuk itu pengusul harus dapat menjamin keberlanjutan (sustainability) kegiatan setelah proyek berakhir

BAGIAN 3. PELAKSANAAN PROYEK

3.1. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pelibatan Pemangku Kepentingan

3.1.1 Lembaga Pelaksana dan Mitra

Sebutkan susunan lembaga pelaksana proyek beserta mitra. Pengusul perlu memperlihatkan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan proyek, termasuk pembagian tanggung jawab masing-masing lembaga anggota konsorsium dan lembaga di luar konsorsium. Gambarkan Diagram / organigram struktur pelaksana.

3.1.2 Pengelola Proyek dan Tim

Pengelola proyek dan Tim pelaksana kegiatan merupakan individu yang duduk dalam strutkur pengelolaan proyek. Dalam proposal ini perlu sebutkan jabatan-jabatan yang bersifat penuh waktu (*full timer*) dan jabatan paruh waktu (*part timer*). Sampaikan susunan struktur pengelola proyek baik di tingkat kantor yang berkedudukan di provinsi/kabupaten maupun di tingkat lapangan.

3.1.3 Steering Committee Proyek (bila diperlukan)

Apabila ada dan atau diperlukan sebutkan juga susunan Komite Pengarah (*steering committee*) di tingkat proyek dalam rangka mempermudah pelaksanaan proyek dan atau mendapatkan dukungan yang bersifat politis maupun teknis dari adanya komite pengarah.

3.1.4 Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Mitra Penerima Manfaat

a. Mitra Kerjasama

Siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang menerima dana hibah langsung maupun sebagai mitra dalam mendukung pelaksanaan kegiatan/program? Termasuk apakah kegiatan ini masuk dalam kegiatan yang tergabung dalam konsorsium serta pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan swasta. Perlu disebutkan Mitra Kerja baik ditingkat Nasional, Regional maupun Daerah (Lokal).

b. Penerima Manfaat/Kelompok Sasaran

Siapakah yang menjadi kelompok sasaran dari proyek dan kegiatan-kegiatan? Tentukan jenis dan jumlah kelompok sasaran (Kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dll) serta lokasi "Kelompok Sasaran" yang menjadi bagian dari Kegiatan. Berapa lama waktu pendampingan terhadap kelompok sasaran telah berlangsung?

3.2. Pelaporan, Review, Pemantauan dan Evaluasi

Pengusul agar menyampaikan rencana pelaporan, review, pemantauan dan evaluasi periodik untuk menjamin ketercapaian proyek. Menguraikan Pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan yang dilakukan, termasuk metode atau cara yang akan digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi selama proyek berlangsunguntuk memastikan seluruh proses sesuai dengan perencanaan. Menyebutkan target yang harus dicapai setiap tahunnya serta indiktornya, juga Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanismenya

Lampiran

- **Lampiran A. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan Organisasi dan Ketua Pelaksana**
- **Lampiran B. Kerangka Kerja Logis**
- **Lampiran C. Rencana Kerja**
- **Lampiran D. Anggaran / Rencana Biaya**
- **Lampiran E. Peta Lokasi Kegiatan**

Lampiran A. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan Organisasi dan Ketua Pelaksana

1. Direktur / Penanggungjawab Lembaga Konsorsium
2. Koordinator / Manajer Program TFCA-Sumatera
3. Koordinator / Manajer Keuangan